

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP), DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GUNUNG KIDUL**

(Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY)

SKRIPSI



Ditulis Oleh :

Nama : Kurnia Rahmah

Nomor Mahasiswa : 141214894

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of application of government accounting standard and the effect of region's financial accounting system on the quality of regency financial statements Gunung Kidul regency (empirical study at government institutions in Gunung Kidul regency DIY). There are 36 respondents in this research uses purposive sampling method. SPSS 17.0 is used to analyze hypotheses in this research.

Based on the result of this research are application of government accounting standard influence positively, but not significant on quality of regency financial statements Gunung Kidul regency, and region's financial accounting system influence positively, but not significant on quality of regency financial statements Gunung Kidul regency.

Keywords: Multiple Regression, Government Accounting Standard, Region's Financial Accounting System, Quality of Region's Financial Report.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, karunia dan rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.

Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah daerah, khususnya lokasi penelitian penulis yaitu Gunung Kidul dan dapat memberikan ide, maupun masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Zulkifli SE, MM. yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Ekonomi Widya Wiwaha.

3. Semua dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Ekonomi Widya Wiwaha khususnya untuk dosen prodi akuntansi yang telah memberikan ilmu serta pengalaman studinya kepada saya.
4. Ibu dan Bapak serta semua keluarga yang telah memberikan semangat dan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Kepada sahabatku dionisius, lina, yayuk, riska yang bersedia membantu menyebar kuesioner ke OPD Gunung Kidul.
6. Kepada kakak Miftahul Jannah yang senantiasa memberikan semangat dan selalu memberikan tekanan dan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
7. Untuk semua teman-teman novi, maylan, bagus, rudy, nia, mba eka yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini.

Sebagai kata akhir, semua kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk penyusunan karya tulis dengan topik yang sama.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Kurnia Rahmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Masalah.....	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Stewardship	10
2.1.2 Teori Akuntabilitas	12
2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	15

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Model Penelitian	22
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	27
1. Populasi.....	27
2. Sampel	28
3. Objek Penelitian.....	29
4. Jenis Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	31
7. Uji Kualitas Data	33
8. Uji Asumsi Klasik.....	34
9. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian.....	40
4.2 Analisis Deskriptif	41
4.3 Uji Kualitas Instrumen.....	45
a. Uji Validitas	45
b. Uji Reliabilitas	49
4.4 Uji Asumsi Klasik	50

a. Uji Normalitas	50
b. Uji Multikolinearitas.....	51
c. Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.5 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	54
a. Koefisien Determinasi	54
b. Uji Statistik F.....	54
c. Uji Parsial (Uji Statistik t).....	55
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis dan Analisis Data	57
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V KESIMPULAN SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya perubahan masa dari orde baru ke era reformasi sangat memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa aspek baik dalam bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja yang berbasis akuntabilitas serta transparansi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (Halim dan Laurensius 2005). Untuk mengelola pemerintahan

daerah benar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya.

Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 31 disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya bermanfaat baik dalam pengertian, aktivitas yang dapat bermanfaat baik dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh para pengguna (Huang *et al*, 1999 dalam Xu *et al*, 2003). Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang

disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik.

Penerapan akuntansi yang baik serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada sebuah instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberi opini jenis ini, artinya auditor berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah/ dianggap telah menyelenggarakan prinsip

akuntansi yang berlaku umum dengan material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. <https://id.wikipedia.org/Opini.BPK>.

SAP merupakan salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan. SAP merupakan landasan dasar yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP, maka akan dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang relevan dan handal serta berguna dalam menentukan keputusan. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataan

tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013.

**Perkembangan Opini BPK Atas LKPD Tahun 2012-2015
dapat Dilihat Pada Tabel 1.1.**

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini LKPD			
		2012	2013	2014	2015
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Kulon Progo	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Website BPK RI

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul siap memperbaiki raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kamis, 31 Maret 2016. “Kami sudah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga semoga kami bisa memperbaiki capaian opini tahun lalu ”Demikian harap **Immawan Wahyudi** di Kantor Perwakilan BPK Yogyakarta”. Parna juga pernah mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA2015 tepat waktu sesuai amanah undang-undang. (www.yogyakarta.bpk.go.id/?p=8533).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki struktur maupun sistem penataan barang milik Negara/Daerah dengan tertib, serta memperbaiki ketentuan ketidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pelatihan terhadap pegawai/staff yang memiliki kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Semua kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul tersebut dijadikan sebagai sebuah poin penting oleh Pemerintah Daerah yang harus diperbaiki agar dapat memperoleh dan mempertahankan opini audit WTP dari BPK RI.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas maka, judul penelitian yang akan diangkat yaitu “*Pengaruh Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul?

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini mengenai kualitas laporan keuangan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunung Kidul. Organisasi Perangkat Daerah dalam penelitian ini yaitu OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kantor Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP). Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan waktu melakukan penelitian yaitu pada tahun 2017. Peneliti ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Junnaini (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja (survei pada Dinas Kota Bandung)”. Penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen serta menguji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menemukan bukti empiris penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan AkruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk menemukan bukti empiris Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah;

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh penerapan SAP (sistem akuntansi pemerintah) berbasis accrual, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, serta memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi sektor publik

2) Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau himbauan bagi pemerintahan daerah dalam menerapkan standar-standar akuntansi

pemerintahan berbasis accrual, agar menghasilkan output laporan keuangan yang bermutu baik, agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Memberi sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai akuntabilitas laporan keuangan.

Masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan baik.

STIE Widya Wicahana
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. (Haliah, 2012).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya

manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2 Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul, ulum 2004). Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun instansi yang telah ditentukan atas pilihan serta tindakannya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari 1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal). 2) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Mardiasmo (2002:20).

Istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan *stewardship* yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban melaporkan. Sedangkan akuntabilitas pengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggungjawab serta berkewajiban untuk membuat pelaporan pengungkapan secara rinci dan jelas.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar Penyelenggaraan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja. Tujuan yang berikutnya adalah perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Teori akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan memberi jawaban yang jelas kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam sebuah organisasi (Rasul, 2003).

Mardiasmo (2005:21) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen,

dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Keterkaitan teori akuntabilitas dengan penelitian ini yaitu, dikarenakan bahwa pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memenuhi aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam memimpin, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam

mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menggunakan basis akrual untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemahaman SAP merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar dalam menyusun pelaporan keuangan. Dimana dengan adanya pemahaman yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik pula, serta berpengaruh terhadap kinerja suatu pelaporan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP N0 71 Tahun 2010) adalah:

1. **Relevan**, yaitu informasi yang didalamnya memuat tentang informasi yang dapat memengaruhi kepuasan pengguna dan dapat membantu mereka dalam menemukan titik keluarnya, baik sebagai alat untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, atau masa kini, dan untuk

memprediksi peristiwa yang akan terjadi dimasa depan. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- ✓ Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang dapat membantu untuk memprediksi masa depan, dengan melihat suatu peristiwa masa lalu dan mempertimbangkannya, serta berdasarkan kejadian masa kini.
 - ✓ Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
 - ✓ Tepat Waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan.
2. **Andal**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kesalahan material, menyajikan informasi secara benar dan jujur, serta dapat diverifikasi kesalahannya.
 3. **Dapat dibandingkan**, yaitu informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan periode yang lalu serta dapat dibandingkan dengan entitas lain yang bergerak dalam bidang yang sama.
 4. **Dapat dipahami**, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh semua kalangan ataupun pihak pengguna laporan keuangan. Dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam peraturan pemerintah No71 Tahun 2010 berarti pemerintah daerah

mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik.

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian SAKD

Menurut Nordiawan (2008) mendefenisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut: “suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Tujuan SKPD

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu:

1. Pertanggung jawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

3. Ruang Lingkup SAKD

Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal.

4. Karakteristik SAKD

SAKD atau Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik (Nordiawan, 2008), diantaranya:

1. Basis akuntansi
2. Sistem pembukuan

5. Penerapan SAKD

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

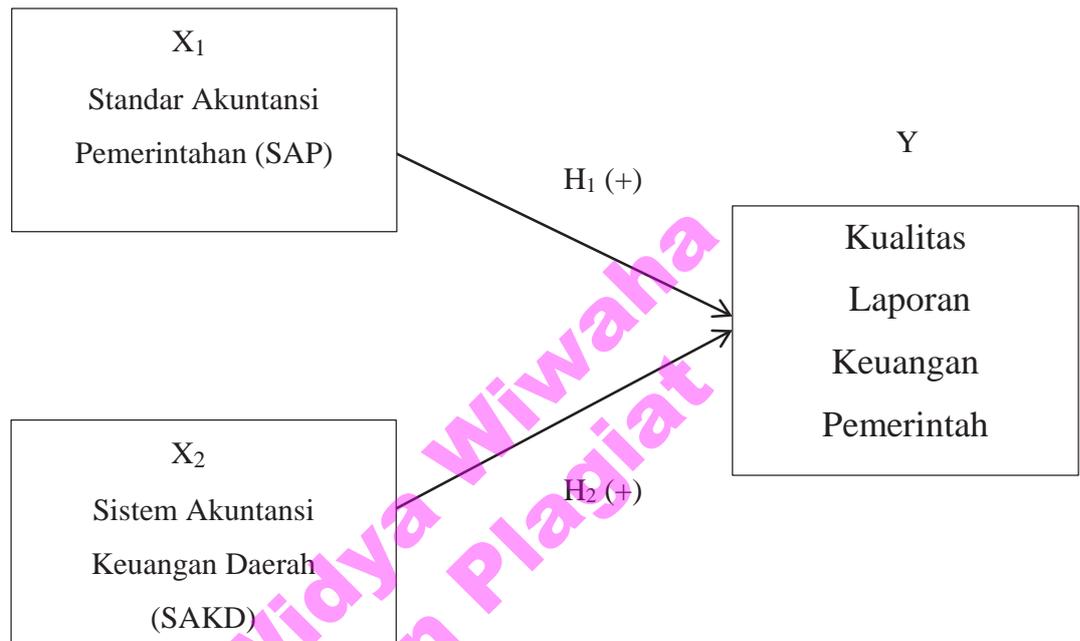
Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Azlim (2012) dengan Judul Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Penelitian Permana (2011) dengan Judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas (Survei Pada Kota Bandung). Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinas Kota Bandung.

2.3 MODEL PENELITIAN



Gambar 1.1

Model Penelitian

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1) Hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dan untuk memperoleh hasil pengukuran kinerja yang lebih baik dan memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka penerapan SAP sangat ditekankan. Penerapan SAP yang sudah sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan SAP dapat diwujudkan

Penerapan SAP diyakini memiliki dampak yang baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemahaman terhadap SAP memang sangat penting, dikarenakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka, pemahaman SAP harus benar-benar dikuasai dan dipahami serta dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Penerapan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.

2) Hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menerapkan sisitem Keuangan Daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus

mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, system akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan adanya diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

H₂: Penerapan Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.

Dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 2) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 3) untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh dari semua variabel

independen yang dipilih terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 METODA PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Kata sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik (metode-metode). Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian (Indriantoro Nur, Supomo Bambang :1999).

1. Populasi

Populasi menurut (Indriantoro Nur, Supomo Bambang :1999) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan pada OPD Pemerintahan Daerah kabupaten Gunung Kidul.

2. Sampel

Wiyono (2011: 76) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang terwakili. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purpose sampling*. *Purpose Sampling* merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Wiyono, 2011: 88). Jumlah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang dari 4 OPD yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purpose sampling*. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dari 29 SKPD hanya 4 OPD yang dijadikan responden yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus perhitungan Slovin dengan tingkat *error* atau kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%. Sedangkan penentuan jumlah sampel untuk setiap OPD ditentukan secara proporsional. Di mana jumlah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan di satu OPD dibagi dengan total pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan di 4

OPD. Kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil perhitungan dengan rumus Slovin yang telah dilakukan.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Dan objek penelitian ini pada OPD di Kabupaten Gunung Kidul yaitu BKAD, BAPPEDA, SATPOL PP dan DPUPRKP.

4. Jenis Data

Umar (2005), menyatakan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti melalui proses penyebaran kuesioner kepada responden sesuai objek yang diteliti dan bersifat *up to date*. Adapun kriteria responden pada penelitian ini yaitu pegawai/staf pada bagian akuntansi/keuangan pada instansi pemerintah yang meliputi kepala staf bagian dan para staf subbagian akuntansi/keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden atau pengguna laporan keuangan terkait permasalahan yang akan diteliti di instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Adapun hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden terpilih, hasilnya akan diolah menggunakan software SPSS. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur yaitu skala *likert* (skala sikap) mempunyai gradasi dari sangat positif ke sangat negative (Sugiyono, 2013:93). Kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah selesai diisi oleh responden kemudian akan diukur menggunakan *skala likert* antara 1 sampai dengan 5 yang memiliki makna yaitu:

3.1. Skor Skala Likert Untuk Kuesioner SAKD dan Kualitas Laporan Keuangan

NO	KETERANGAN	SKOR
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Netral	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

3.2. Skor Skala Likert Untuk Kuesioner Penerapan SAP

NO	KETERANGAN	SKOR
1.	Tidak Menerapkan	1
2.	Hanya Sedikit Menerapkan	2
3.	Sebagian Menerapkan	3
4.	Menerapkan	4
5.	Menerapkan Penuh	5

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional yaitu aspek penelitian yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang sangat penting bagi para peneliti lain dalam rangka membuat suatu penelitian yang sejenis dengan variabel yang sama. Dengan adanya informasi tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apakah peneliti akan melanjutkan prosedur pengukuran yang sama atau menggunakan prosedur yang baru, Peneliti yang satu dengan peneliti yang lain memiliki definisi yang berbeda terhadap satu judul penelitian.

Variabel Penelitian merupakan sesuatu hal yang memang memiliki sifat dan mempunyai variasi tertentu, yang sengaja dibuat untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1994). Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian yaitu, variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Dependen

Variabel Dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti (Sekaran 2006). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah peneliti ambil sebagai variabel dependen karena kualitas pelaporan keuangan daerah yang disusun oleh instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul masih relatif rendah dan masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan yang baik yaitu sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Kabupaten Gunung Kidul belum meraih status wajar tanpa pengecualian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.

b. Variabel Independen

Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah.

1) Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah mengatur Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*General purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan.

7. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid/tidaknya suatu kuesioner dan untuk melakukan pengukuran tingkat keandalan alat

ukur yang digunakan. Apabila koefisien korelasinya menunjukkan signifikan 0,361 atau jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif maka pernyataan/indikator instrument yang digunakan adalah valid (Ghozali, 2009).

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas data digunakan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda atau berubah jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subjek yang sama. Penelitian Sugiyono (2009) menyatakan Instrumen dikatakan *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, alat ukur dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

8. Uji Asumsi klasik

Adapun langkah-langkah yang dilakukan jika menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa Uji Asumsi Klasik yang harus dipenuhi diantaranya: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedisitas. Adapun rinciannya sebagai berikut.

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Smirnov test* (1-Sampel K-S). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel Independent). Model regresi yang baik yaitu yang tidak saling berkorelasi antar variabel bebas. Jika diantara variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Ortogonal yaitu variabel independen yang masing-masing variabel memiliki nilai korelasi variabel bebas = 0. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) Nilai Toleransi dan Lawannya, (2) Variance Inflation Faktor (VIF). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari Multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan angka *Tolerancenya* mendekati 1. *Tolerance* merupakan variabel-variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat dijelaskan dengan variabel-variabel bebas lainnya. Nilai *cut off* yang sering

digunakan adalah nilai *Tolerance* 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 (Ghozali 2005).

Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen jika $VIF < 10$, dan nilai *Tolerance* $> 0,1$. Terdapat multikolinearitas antar variabel independen jika $VIF > 10$, dan nilai *Tolerance* $< 0,1$.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi. Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, berarti dapat dikatakan Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas (Gozali 2011). Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Model regresi dapat dikatakan Heteroskedastisitas jika nilai α lebih besar dari 5%.

9. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah analisis regresi yang terdiri dari dua atau lebih variabel-variabel Independen. Menurut Ghozali (2011), untuk memperoleh kebenaran dari prediksi dan pengujian regresi yang dilakukan, maka perlu melakukan berbagai cara untuk mencari nilai Koefisien Determinasi, Uji Simultan Dan Uji Parsial.

a) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2005). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif.

Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan

1. Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Menurut Ghozali (2011), banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan adjusted R^2 daripada R^2 . Hal ini disebabkan bahwa jika terdapat penambahan satu variabel Independen maka R^2 akan meningkat. Sedangkan pada Adjusted R^2 akan mengalami

kenaikan atau penurunan jika ada penambahan variabel independen dalam bentuk atau model regresi.

b) Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2005). Jika hasil F test diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F_{df} dan signifikansi jauh di bawah derajat kepercayaan yang ditentukan maka model regresi dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya: Signifikan bila $r \text{ value} < \alpha$ (0,05).

c) Uji Parsial (Uji Statistik t)

Statistik t berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2011). Uji nilai t memiliki tingkat signifikansi 5%. Kriterianya yaitu ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial yaitu diterima jika nilai $t < \alpha$ (0,05).

d) Model Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

β_1 : Slope regresi atau koefisien regresi dari X_1

β_2 : Slope regresi atau koefisien regresi dari X_2

X_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

X_2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

e : Kesalahan residual (error term)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17,0 dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$).

STIE Widya Niwanda
Jangan Plagiat

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBYEK/SUBYEK PENELITIAN

a. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas penyebaran kuesioner kepada pegawai/staf bagian keuangan pada OPD Gunung Kidul.

Hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan diperoleh data yang terlihat pada tabel 4.1. berikut yang menunjukkan secara singkat mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner yang dijawab oleh responden.

Tabel 4.1.
Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	36
Kuesioner yang kembali	32
Kuesioner yang tidak kembali	4

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat)	2
Kuesioner yang diolah	30
Tingkat pengembalian kuesioner (<i>Response rate</i>) : $32/36 \times 100\%$	88,9%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Dari tabel 4.1. menunjukkan bahwa 36 kuesioner yang disebar kepada responden, kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti sejumlah 32 kuesioner atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai *respon rate* sebesar 88,9%. Dari 32 yang dikembalikan tersebut, terdapat kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) sebanyak 2 kuesioner, sehingga data yang dapat digunakan untuk analisis sebanyak 30 kuesioner.

4.2 ANALISIS DESKRIPTIF

a. Deskripsi Responden

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti. Karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan subjek penelitian sebanyak 30 responden yaitu dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir.

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.

Table 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	19	63%
Laki-laki	11	37%
Total	30	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.2. dan grafik 4.1. menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin Perempuan yaitu 19 orang (63%) dan sisanya sebanyak 11 orang (37%) adalah laki-laki.

b) Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini:

Table 4.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur (tahun)	Jumlah	Persentase
< 20 Tahun	1	3,3%
20-35 Tahun	11	36,7%
36-50 Tahun	15	50%
>50 Tahun	3	10%
Total	30	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah yang memiliki kisaran umur 36-50 tahun yaitu

sebanyak 15 orang dengan persentase 50%, kemudian responden terbanyak kedua adalah yang memiliki kisaran umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase 36,7%, serta yang memiliki kisaran umur diatas 50 tahun yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase 10% dan yang memiliki tingkat responden paling kecil yaitu responden yang berada pada kisaran umur kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 3,3%.

c) Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SLTA/Sederajat	-	0%
Diploma (D3)	10	33,3%
Strata 1 (S1)	18	60%
Strata 2 (S2)	2	6,7%
Total	30	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukkan bahwa responden terbanyak yaitu Strata 1 (S1) berjumlah 18 orang (60%), Strata 2 (S2) berjumlah 2 orang (6,7%), Diploma 3 (D3) berjumlah 10 orang (33,3%), dan SLTA/Sederajat berjumlah (0%)

b. Statistik Deskriptif

Berdasarkan judul penelitian, variabel-variabel yang diukur pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

Adapun spesifik responden dari penelitian ini yaitu pegawai/staf yang menjabat sebagai kepala bagian, kepala sub bagian serta sebagai staf biasa pada bagian keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dari responden secara keseluruhan lebih banyak lulusan S1 yang terdiri dari sarjana akuntansi, sarjana ekonomi, administrasi keuangan, arsip, teknik informatika, dan politik. Yang memiliki latar belakang pendidikan S2 hanya 2 orang yang terdiri dari lulusan sarjana akuntansi dan keuangan Negara. Responden yang terdiri dari lulusan D3 sebagian besar lulusan akuntansi, teknik informatika dan lulusan manajemen. Hasil statistik deskriptif dari ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5.
Hasil Uji Deskriptif
Statistics

		PSAP	SAKD	KLKPD
N	Valid	30	30	30
	Missing	0	0	0
	Mean	37.0667	17.4000	67.3667
	Median	36.0000	17.0000	64.0000
	Std. Deviation	4.96841	1.94049	9.42661
	Minimum	28.00	13.00	51.00
	Maximum	45.00	20.00	80.00

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Tabel 4.5. menjelaskan bahwa variabel PSAP jawaban minimum responden sebesar 28 dan nilai maksimum adalah 45 dan rata-rata total jawaban 37,067 dan standar deviasi sebesar 4,968. Variabel SAKD jawaban minimum responden sebesar 13 dan nilai maksimum adalah 20 dan rata-rata total jawaban 17,400 dan standar deviasi sebesar 1,940. Variabel KLKPD jawaban minimum responden sebesar 51 dan nilai maksimum adalah 80 dan rata-rata total jawaban 67,367 dan standar deviasi sebesar 9,426

4.3 UJI KUALITAS INSTRUMEN

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kevalidan suatu pertanyaan dari penyebaran kuesioner. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel, maka point

pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap data penelitian disajikan pada tabel dibawah ini.

.Tabel 4.6.
Hasil Uji Validitas Variabel PSAP

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
	PSAP 3	0,855	0,361	Valid
	PSAP 5	0,651	0,361	Valid
	PSAP 6	0,372	0,361	Valid
	PSAP 7	0,843	0,361	Valid
	PSAP 8	0,438	0,361	Valid
	PSAP 9	0,857	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai di bawah 0,361 dan sebagiannya memiliki nilai di atas 0,361. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan ada yang tidak valid dan valid.. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 ada 6 yaitu untuk butir pertanyaan No 3 (0,855), 5 (0,651), 6 (372), 7 (0,843), 8 (0,438), dan 9 (0,857). Adapun butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara di bawah 0,361 ada yaitu untuk butir pertanyaan No 1 (0,278), 2 (0,309), 4 (0,360).

Tabel 4.7.
Hasil Uji Validitas Variabel SAKD

Variable	Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
SAKD	SAKD 1	0,889	0,361	Valid
	SAKD 2	0,852	0,361	Valid
	SAKD 3	0,882	0,361	Valid
	SAKD 4	0,946	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai diatas 0,361 hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 ada 4 yaitu untuk butir pertanyaan No 1 (0,889), 2 (0,852), 3 (0,882) dan 4 (0,946)

Tabel 4.8.
Hasil Uji Validitas Variabel KLKPD

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
	KLKPD 1	0,915	0,361	Valid
	KLKPD 2	0,793	0,361	Valid
	KLKPD 3	0,898	0,361	Valid
	KLKPD 4	0,931	0,361	Valid

	Keterangan	R hitung	r tabel	Keterangan
KLKPD	KLKPD5	0,880	0,361	Valid
	KLKPD 6	0,759	0,361	Valid
	KLKPD7	0,832	0,361	Valid
	KLKPD 8	0,817	0,361	Valid
	KLKPD 9	0,912	0,361	Valid
	KLKPD 10	0,890	0,361	Valid
	KLKPD 11	0,892	0,361	Valid
	KLKPD 12	0,937	0,361	Valid
	KLKPD 13	0,875	0,361	Valid
	KLKPD14	0,885	0,361	Valid
	KLKPD 15	0,907	0,361	Valid
	KLKPD 16	0,937	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai diatas 0,361. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 dan 0,900 an ada yaitu untuk butir pertanyaan No 2 (0,793), 3 (0,898), 5 (0,880), 6 (0,759), 7 (0,832), 8 (0,817), 10 (0,890), 11 (0,892), 13 (0,875), 14 (0,885). Adapun butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,900 an ada 6 yaitu untuk butir pertanyaan No, 1 (0,915), 4 (0,931), 9 (0,912), 12 (0,937), 15 (0,907), 16 (0,937).

Berdasarkan tabel uji validitas di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi r -hitung $>$ r tabel yang diperoleh dibandingkan dengan r -tabel pada taraf signifikansi 5%. Bila r hitung $>$ r tabel maka alat tersebut dinyatakan valid. Pada penelitian ini nilai r tabel adalah sebesar 0,361.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel uji validitas menunjukkan bahwa poin-poin pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner mempunyai r hitung $>$ r tabel (0,361), dengan demikian hanya item pertanyaan dalam kuesioner penerapan standar akuntansi pemerintahan yang memiliki jawaban tidak valid berjumlah 3 item pertanyaan sedangkan yang valid berjumlah 6 item pertanyaan., dan item pertanyaan dalam kuesioner sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berubah atau konsisten terhadap instrument penelitian. Jika nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60 maka instrument penelitian dapat dikatakan reliabel. Hasil uji validitas terhadap data penelitian yang disajikan pada tabel 4.9. sebagai berikut.

Tabel 4.9.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Reliabilitas	Keterangan
PSAP	0,760	0,60	Reliabel
SAKD	0,912	0,60	Reliabel
KLKPD	0,979	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Pada tabel 4.9. menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,760, sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,912, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,979. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

4.4 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis jalur, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *one sample kolmogrov smirnov test*, yang mana jika nilai *asyp.sig (2-tailed)* > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.10. dibawah ini.

Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.10.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.34822234
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.101
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.770
Asymp. Sig. (2-tailed)		.594

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil pengujian, maka semua komponen penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal karena nilai asymp sig (2-tailed) > dari 0,05 yaitu sejumlah 0,594.

b. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, untuk melihat hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
PSAP	0,877	1,141	Bebas Multikolinearitas
SAKD	0,877	1,141	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.13. menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari masing masing variabel independen kurang dari 10.

Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai tolerance sebesar 0,877 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,141. Berdasarkan hasil penelitian maka variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan bebas dari multikolinearitas karena sudah memenuhi ketentuan.

Variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,877 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,141. Berdasarkan hasil penelitian maka variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah bebas dari multikolinearitas karena sudah memenuhi ketentuan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan $\alpha=5\%$. Model regresi dapat dikatakan Heteroskedastisitas jika nilai sig lebih besar dari 5%.

Tabel 4.12.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.401	10.265		-.429	.671
psap	.007	.218	.007	.032	.974
sakd	.598	.558	.215	1.072	.293

a. Dependent Variable: res_2

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Dari semua variabel ini tidak terdapat heteroskedastisitas, dimana jumlah sig untuk variabel PSAP sebesar 0,974 dan untuk variabel SAKD nilai sig sejumlah 0,293.

4.5 ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

a. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1

Tabel 4.13.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.464 ^a	.216	.158	8.65189

a. Predictors: (Constant), sakd, psap

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.15. yaitu diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,158 hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan model variasi variabel terikat sebesar 15,8%. Sedangkan 84,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.

b. Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan

mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat signifikan dibawah 0,05.

Tabel 4.14.
Hasil Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	555.875	2	277.937	3.713	.038 ^a
	Residual	2021.092	27	74.855		
	Total	2576.967	29			

a. Predictors: (Constant), sakd, psap

b. Dependent Variable: klkpd

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.14. diketahui nilai signifikan sebesar 0,038. Karena nilai signifikan $< 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul.

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Statistik t berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Ada tidaknya pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial diterima jika nilai sig $t < (0,05)$.

Tabel 4.15.
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.317	16.271		1.433	.163		
psap	.378	.345	.199	1.095	.283	.877	1.141
sakd	1.726	.884	.355	1.952	.061	.877	1.141

a. Dependent Variable: klkpd

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.15. variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai sig sebesar 0,283, dan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,061.

Kesimpulannya bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memenuhi ketentuan karena nilai sig $0,283 > 0,05$, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memenuhi ketentuan karena nilai sig $0,061 > 0,05$.

4.6 HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN ANALISIS DATA

a. Persamaan Regresi Berganda

Tabel 4.16.
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koef. B	T	Sig	Keterangan
Konstanta	23,317	1,433	0,163	
PSAP	0,378	1,095	0,283	Ditolak
SAKD	1,726	1,952	0,061	Ditolak
Adj. R Square	0,158			
F statistic	3,713			
Sig F	0,038			

Dependen variabel: KLKPD

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

$$KLKPD = 23,317 + 0,378 PSAP + 1,726 SAKD + e$$

Hasil analisis persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta KLKPD (Y) sebesar 23,317. Koefisien regresi variabel PSAP(X_1) 0,378, dan koefisien variabel SAKD (X_2) sebesar 1,726.

b. Hasil Pengujian H_1

Hasil pengujian H_1 pada tabel 4.16. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,378, nilai t hitung sebesar 1,095 dengan nilai sig 0,283 > α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya H_1 ditolak

c. Hasil Pengujian H₂

Hasil pengujian H₁ pada tabel 4.16. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 1,726, nilai t hitung sebesar 1,952 dengan nilai sig 0,061 > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang artinya H₂ ditolak.

4.7 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan pada OPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan PSAP secara

keseluruhan, pemahaman terhadap PSAP hanya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi terkait dengan perolehan dana, pengelolaan dana, serta pengeluaran dana saja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Janaini (2012) dan Kusumah (2012) mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitiannya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan pada OPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan SAKD secara keseluruhan, pemahaman terhadap SAKD hanya sebatas pelaporan

keuangan yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dan Sihombing (2011) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan. Hal-hal yang dapat mendukung perolehan opini WTP Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 yaitu diantaranya memperhatikan penyajian dan pengelolaan aset tetap, melakukan perbaikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), serta memperbaiki pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar semakin baik kedepannya.

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hasil uji t diperoleh bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

2. Hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

5.2 SARAN

Hasil koefisien determinasi sebesar 0,158 menunjukkan kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya hanya 15,8%. Jadi pengaruh kedua variabel masih sangat kecil, oleh karena itu bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah variabel bebas, agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi dalam membuktikan hipotesis.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian yang dipaparkan untuk lebih meningkatkan hasil penelitian selanjutnya, yaitu:

- 1) Populasi pada penelitian ini hanya mencakup 4 OPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.
- 2) Waktu penelitian relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang diterima masih jauh dari yang diharapkan.
- 3) Penelitian ini hanya menguji tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, Darwis, Usman Abu Bakar. 2012. *pengaruh penerapan GOOD GOVERNANCE dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*.
- Donaldson, L., Davis, J, H, 1991, Stewardship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, *Australian Journal Of Management*, 16, PP 49-46.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haliah, 2012, “*Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*”, Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Opini.BPK>.
- <https://www.bpk.go.id/diy/konten/1857/Mitra-Kerja>.
- Indriantoro Nur, Supomo Bambang, 1999, *Metode Penelitian Bisnis, yogyakarta, BPFE- Yogyakarta*.
- Jannaini, Yuli. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Jurnal Accounting*. Vol 2, No: 1 Tahun 2014 (e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1).
- Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1, No 1.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta: Andi*
- Nurhayati, Riani, (2013), “*pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.

- Prasetya, Gede Edy. 2005 *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riana, Susilawati, "Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".ISSN: 1693-4482
- Ropiyantie, Devi, (2013), "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Economic Accounting*, Vol 1, No. 1. Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Sekaran Uma, (2006), *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, Binsar. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Bisnis*: Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin, 2003, "Key issue of accounting information quality management: Australian case studies". *Industrial Management & Data System* 103/7, 461- 470.